

Pengaruh Kebijakan Luar Negeri Amerika di Timur Tengah Pasca Perang Dingin (1991-2001)

M.Rasyid Ridha^{1*}, Noventus Marianto Pati Ritan², Asmunandar³

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar
m.rasyid.ridha@unm.ac.id, ritannoventus@gmail.com, asmunandar@unm.ac.id
corresponding author*)

Abstrak

Artikel ini membahas pengaruh kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah setelah Perang Dingin, khususnya pada periode 1991-2001. Setelah runtuhnya Uni Soviet, AS muncul sebagai kekuatan dominan global yang berusaha membentuk tatanan baru di Timur Tengah melalui intervensi militer, dukungan terhadap rezim tertentu, dan keterlibatan dalam proses perdamaian Israel-Palestina. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk mengeksplorasi dampak kebijakan AS terhadap dinamika politik, ekonomi, dan sosial di Timur Tengah, serta respons masyarakat internasional terhadapnya. Kebijakan AS di kawasan ini, yang melibatkan penekanan pada keamanan energi dan stabilitas regional, telah menciptakan ketegangan yang berkelanjutan dan memicu berbagai konflik baru. Contoh penting adalah keterlibatan AS dalam Perang Teluk pada 1991, yang memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah namun juga menyebabkan instabilitas politik di Irak akibat sanksi ekonomi yang berat. AS juga berperan aktif dalam proses perdamaian antara Israel dan Palestina, seperti yang terlihat pada Konferensi Madrid dan Perjanjian Oslo, meskipun upaya ini diwarnai oleh tantangan politik yang besar. Artikel ini menggambarkan kompleksitas hubungan internasional dan pengaruh hegemonik AS di kawasan, yang membawa dampak jangka panjang pada stabilitas Timur Tengah dan interaksi dengan komunitas global.

Kata Kunci: Amerika Serikat, Perang Dingin, Timur Tengah.

Abstrak

This article discusses the influence of United States (US) foreign policy in the Middle East after the Cold War, specifically from 1991 to 2001. After the Soviet Union's collapse, the US emerged as the dominant global power, aiming to establish a new order in the Middle East through military intervention, support for certain regimes, and involvement in the Israeli-Palestinian peace process. This study uses a qualitative analysis approach to explore the impact of US policies on the political, economic, and social dynamics in the Middle East, as well as the international community's response to these actions. US policy in the region, emphasizing energy security and regional stability, has created ongoing tensions and triggered various new conflicts. A notable example is US involvement in the Gulf War in 1991, which strengthened its influence in the Middle East but also led to political instability in Iraq due to heavy economic sanctions. The US also played an active role in the peace process between Israel and Palestine, as seen in the Madrid Conference and the Oslo Accords, although these efforts faced significant political challenges. This article highlights the complexity of international relations and the US's hegemonic influence in the region, which has had long-term impacts on Middle Eastern stability and interactions with the global community.

Keyword: United States, Cold War, Middle East.

PENDAHULUAN

Dalam politik internasional, Amerika Serikat berfokus pada Timur Tengah. Sejauh ini, AS menganggap Arab Saudi sebagai sekutu strategis di Timur Tengah. Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Arab Saudi, negara penghasil dan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia, selama beberapa tahun. Oleh karena itu, keberadaannya ini sangat penting bagi kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah. Negara-negara ini sangat bergantung satu sama lain. Sementara Arab Saudi sangat bergantung pada keterlibatan Amerika dalam ekonomi, pertahanan, dan keamanan, Amerika membutuhkan pasokan minyak Saudi untuk berkembang. Sebelum ini, AS tidak memiliki masalah dengan sistem politik Arab Saudi, yang tidak menganut demokrasi (Satrio, 2019).

Bagi Amerika, selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan Saudi yang telah dibangun sejak tahun 1930-an, alasan minyak adalah karena produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau mengamankan pasar minyak global. Ini juga merupakan pertaruhan politik yang signifikan tentang kemungkinan runtuh rezim Saudi. Jika ini terjadi, pengganti keluarga Al-Saud akan berasal dari para penantang hegemoni Amerika, terutama Al Qaeda. Ini menunjukkan bahwa kepentingan Amerika untuk mempertahankan kerajaan tidak hanya bergantung pada faktor ekonomi, tetapi juga pada faktor politik. Namun, dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab, terutama Arab Saudi, berubah drastis setelah peristiwa 11 September 2001, yang menghancurkan gedung Pentagon di Washington dan menara kembar World Trade Center di New York. 15 dari 19 tersangka pelaku terorisme itu adalah warga Arab Saudi (Satrio, 2019).

Amerika Serikat mencoba mengubah struktur sosial di Arab, yang dianggap sebagai sumber terorisme dan radikalisme. Jadi, mensosialisasikan dan menerapkan demokrasi di kawasan Arab sekarang menjadi fokus utama kebijakan politik Amerika di sana. Hubungan AS-Arab Saudi tidak pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya (Nasir et al., 2017). Kebijakan dalam negeri Arab Saudi juga dipengaruhi oleh desakan reformasi Amerika. Ini terlihat dari pengumuman kerajaan bahwa mereka akan mengadakan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih wakil rakyat, setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah. Persetujuan Arab Saudi untuk membentuk komite hak asasi manusia menunjukkan pergeseran perspektif tentang hak asasi manusia. Sebelum ini, Arab Saudi berpendapat bahwa beberapa prinsip hak asasi manusia yang diakui secara global tidak sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, pemilu adalah peristiwa politik bersejarah bagi Arab Saudi karena merupakan yang pertama sejak negara itu didirikan (Iv et al., 2005).

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pasca Perang Dingin (1991-2001) merupakan periode yang krusial dalam sejarah hubungan internasional. Setelah runtuhnya Uni Soviet, AS muncul sebagai kekuatan dominan global, yang mempengaruhi dinamika politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, kebijakan luar negeri AS tidak hanya berfokus pada stabilitas regional, tetapi juga pada kepentingan strategis dan ekonomi yang lebih luas, termasuk akses terhadap sumber daya energi dan dukungan terhadap sekutu-sekutu kunci seperti Israel dan Arab Saudi (Alkalah, 2016). Periode ini ditandai dengan sejumlah intervensi militer dan diplomasi yang aktif, termasuk keterlibatan dalam konflik Teluk Persia dan upaya untuk memfasilitasi proses perdamaian antara Israel dan

Palestina. Kebijakan ini sering kali dipengaruhi oleh ideologi neokonservatisme yang berkembang di kalangan pembuat kebijakan AS, yang mendorong pendekatan lebih agresif terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman terhadap kepentingan Amerika dan sekutunya (Assyakurrohim et al., 2022). Pernyataan Presiden Bush tersebut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang mencakup program perang terhadap terorisme. Rezim setelah Presiden Bush, Barack Hussein Obama, melanjutkannya. Amerika Serikat melakukan intervensi dan kebijakan luar negeri di Asia, Afrika, dan area lain selama pemerintahannya (Jamil, 2017).

Masalah keamanan berkembang menjadi masalah melintasi batas negara dan di luar negeri setelah perang dingin berakhir. Tidak diragukan lagi, masalah keamanan yang terjadi di beberapa negara memiliki konsekuensi yang merugikan bagi negara-negara tersebut, dan tindakan tersebut dapat dianggap teroris bagi kelompok tertentu. Setelah peristiwa teror di menara kembar World Trade Center (WTC) milik AS pada 11 September 2001, terorisme menjadi topik diskusi yang hangat (Budiarto, 2022). Sejak peristiwa itu, negara-negara barat telah menyerukan perang melawan terorisme. Pernyataan Presiden Bush menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk program perang melawan terorisme, yang kemudian dilanjutkan oleh rezim selanjutnya, di bawah kepemimpinan Barack Hussein Obama. Amerika Serikat melakukan intervensi dan kebijakan luar negeri di Asia, Afrika, dan area lain selama pemerintahannya (Nasir et al., 2017).

Islam yang sebelumnya telah mengalami kemunduran dan kalah dalam Perang Dunia I, resmi dibubarkan dengan runtuhnya Kekaisaran Utsmaniyah. Proses pembubaran ini terjadi melalui perjanjian yang dibuat antara diplomat Inggris, Mark Sykes, dan diplomat Perancis, François George-Picot, yang disetujui oleh Rusia melalui Sergey Dimitriyevich Sazonov. Melalui perjanjian tersebut, wilayah Utsmaniyah dibagi-bagi menjadi beberapa teritorial yang dikuasai oleh pemenang perang, yang pada akhirnya memunculkan batas-batas nasional serta lahirnya nation state di wilayah Jazirah. Proses ini menjadi salah satu faktor penting dalam terbentuknya Timur Tengah modern yang kita kenal sekarang (Encyclopedia Britannica, 2019). Timur Tengah terkenal dengan banyak negara yang menerapkan sistem pemerintahan otoriter. Dalam banyak situasi, sistem pergantian kepala negara dan pejabat tinggi masih sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan. Di banyak negara, seorang pemimpin dapat menjabat selama bertahun-tahun, dan setelah masa jabatannya berakhir, posisi tersebut sering kali diisi oleh keturunannya atau kerabat dekat. Mekanisme ini menciptakan sebuah siklus di mana kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga atau kelompok tertentu, sehingga menghalangi munculnya alternatif kepemimpinan yang lebih demokratis dan inklusif (Skripsi Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Di Timur Tengah Dalam Studi Kasus Isis, 2017).

Mempelajari konteks sejarah yang melatarbelakangi fenomena ini sangat penting untuk generasi muda. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, politik, dan dinamika sosial di Timur Tengah, mereka dapat lebih kritis terhadap keadaan di negara mereka. Pembelajaran sejarah yang efektif tidak hanya mengajarkan fakta-fakta, tetapi juga memberikan wawasan tentang pola-pola yang berulang dalam pemerintahan dan Masyarakat (Satrio, 2019). Hal ini dapat mendorong generasi muda untuk terlibat secara aktif dalam proses perubahan sosial dan politik, serta membentuk masa depan yang lebih baik (SHELEMO, 2023).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selama periode tersebut, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di kawasan. Dengan memahami konteks dan implikasi dari kebijakan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi oleh negara-negara Timur Tengah dalam menghadapi dominasi AS serta respons masyarakat internasional terhadap kebijakan tersebut kerajaan Saudi ini (Mustofa, 2022).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode kajian pustaka. Metode kajian pustaka adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk membangun landasan teori yang kuat bagi penelitian yang dilakukan serta untuk memahami konteks dan perkembangan topik yang diteliti. Kajian pustaka bertujuan untuk: Mengidentifikasi tren kebijakan: Menganalisis bagaimana kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah berubah setelah Perang Dingin berakhir dan tujuan strategisnya. Mempelajari sumber pengaruh: Menilai faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keputusan kebijakan AS, seperti politik domestik, hubungan internasional, kepentingan ekonomi, dan isu keamanan. Membandingkan perspektif ahli: Menelaah pandangan dari berbagai akademisi atau pakar politik internasional mengenai dampak kebijakan AS pada stabilitas politik, ekonomi, dan sosial di Timur Tengah. Mengevaluasi dampak jangka panjang: Mengidentifikasi bagaimana kebijakan tersebut membentuk hubungan AS dengan negara-negara Timur Tengah dan mempengaruhi dinamika regional selama periode tersebut. Melalui metode ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pengaruh kebijakan luar negeri Amerika di Timur Tengah pada periode 1991-2001 (Aditya Wardhana, Budi Rustandi Kartawinata, 2014).

PEMBAHASAN

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah pasca-Perang Dingin merupakan salah satu bagian yang paling strategis dan dinamis dalam arena politik internasional. Periode antara 1991 hingga 2001 menandai fase krusial dalam hubungan internasional, di mana AS muncul sebagai satu-satunya kekuatan global setelah runtuhnya Uni Soviet. Hal ini memberikan AS peran yang semakin dominan dalam menentukan arah dan kebijakan di berbagai belahan dunia, termasuk di kawasan Timur Tengah. Di kawasan ini, AS mengedepankan kepentingan nasionalnya yang berkaitan dengan keamanan energi, stabilitas regional, dan perang melawan terorisme (Yuanita et al., 2024).

Runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989, diikuti dengan pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991, menandai berakhirnya era Perang Dingin yang selama hampir setengah abad didominasi oleh persaingan antara dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Uni Soviet (Yuanita et al., 2024). Pasca-Perang Dingin, kebijakan luar negeri AS mengalami penyesuaian besar. Sebagai negara adidaya yang baru muncul tanpa pesaing global, AS memiliki ruang lebih bebas untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang lebih agresif dan menentukan.

Kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah pada dekade ini mencakup berbagai aspek, seperti penyelesaian konflik Israel-Palestina, penanganan rezim-rezim otoriter, penjaminan keamanan suplai minyak, serta melawan terorisme yang mulai berkembang setelah serangan terhadap menara kembar World Trade Center pada 11 September 2001 (Yuanita et al., 2024).

Pada masa ini, Timur Tengah menjadi kawasan yang sangat penting bagi kepentingan geopolitik AS. Keberadaan cadangan minyak terbesar di dunia serta lokasi strategis kawasan ini menjadikannya fokus utama kebijakan luar negeri AS (Jamil, 2017). Selain itu, Timur Tengah merupakan titik panas konflik yang berkelanjutan, yang mengharuskan AS untuk mengambil peran sebagai mediator sekaligus penjamin stabilitas kawasan. Tidak hanya masalah ekonomi dan energi, tetapi juga isu-isu ideologis, politik, serta keamanan nasional yang turut memengaruhi cara pandang dan tindakan AS di kawasan tersebut. Kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah pada periode 1991 hingga 2001 dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan, menjamin pasokan energi dunia, serta merespons dinamika politik dan keamanan regional, termasuk ancaman terorisme dan proliferasi senjata pemusnah massal. Kebijakan AS terhadap Timur Tengah ini juga tidak terlepas dari hubungan historisnya dengan sekutu-sekutu penting di kawasan, seperti Israel, Arab Saudi, dan Mesir. Selain itu, peran AS dalam Perang Teluk tahun 1991 menjadi salah satu peristiwa penting yang memperlihatkan keterlibatan militer AS yang signifikan di Timur Tengah setelah berakhirnya Perang Dingin (Serikat & Carter, 2006).

Pasca berakhirnya Perang Teluk pada tahun 1991, AS semakin mempertegas perannya sebagai penjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah kebijakan sanksi dan isolasi terhadap Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein, yang dituduh mengembangkan senjata pemusnah massal (Imannurdin et al., 2023). Pemerintah AS, terutama di bawah kepemimpinan Presiden George H. W. Bush dan Bill Clinton, juga menginisiasi upaya-upaya diplomatik untuk menciptakan perdamaian di kawasan, termasuk mendukung proses perdamaian Israel-Palestina melalui Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada tahun 1993. Namun, keberhasilan AS dalam menjaga stabilitas Timur Tengah selama periode ini tidak selalu mulus, mengingat kompleksitas hubungan antarnegara di kawasan, serta meningkatnya radikalisme dan anti-Amerikanisme (Soedradjat, 2022).

A. Peran Amerika Serikat di Timur Tengah Pasca-Perang Dingin

Setelah berakhirnya Perang Dingin, AS menghadapi tantangan baru dalam menyusun kebijakan luar negerinya, termasuk di Timur Tengah. Dalam periode 1991 hingga 2001, ada tiga isu utama yang mendominasi kebijakan AS di kawasan ini: konflik Arab-Israel, stabilitas politik dan keamanan negara-negara Teluk, serta ancaman terorisme yang terus berkembang. Keberadaan sumber daya energi yang melimpah di kawasan ini, terutama minyak bumi, juga menjadi alasan penting mengapa AS terus memperkuat pengaruhnya di Timur Tengah. Selain itu, kepentingan AS di kawasan ini juga melibatkan upaya untuk menekan pengaruh Iran yang terus tumbuh, serta menghadapi gerakan-gerakan radikal yang berusaha menggoyang rezim-rezim yang bersahabat dengan AS (Studies, 2021).

Salah satu kebijakan paling penting yang dilakukan AS di Timur Tengah selama periode ini adalah upaya untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Sebagai sekutu utama Israel, AS memiliki peran penting dalam proses negosiasi damai antara Israel dan Palestina. Di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, AS berupaya keras untuk mencapai kesepakatan damai yang komprehensif. Puncaknya adalah Perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1993, yang memberikan harapan baru bagi perdamaian di kawasan tersebut (Soedradjat, 2022). Namun, berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik ini menghadapi banyak hambatan, termasuk ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dan munculnya kekerasan yang sporadis. Meskipun demikian, AS terus berperan sebagai mediator dalam setiap upaya untuk mencapai perdamaian antara Israel dan Palestina (Yuanita et al., 2024).

Di samping isu Israel-Palestina, AS juga harus menghadapi ancaman dari Irak di bawah Saddam Hussein. Setelah invasi Irak ke Kuwait pada 1990 yang memicu Perang Teluk, AS memimpin koalisi internasional untuk mengusir Irak dari Kuwait (Imannurdin et al., 2023). Pasca perang tersebut, AS memberlakukan sanksi ekonomi yang berat terhadap Irak dan melakukan berbagai operasi militer terbatas untuk menekan kekuatan Saddam Hussein. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah Irak mengembangkan senjata pemusnah massal, serta membatasi pengaruh Saddam Hussein di kawasan. Namun, kebijakan sanksi tersebut juga mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Irak, yang pada gilirannya memicu sentimen anti-Amerika di kawasan tersebut (Alkalah, 2016).

Selama periode 1991 hingga 2001, AS juga memperkuat hubungannya dengan negara-negara Teluk, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Kawasan Teluk menjadi sangat strategis bagi AS, tidak hanya karena keberadaan sumber daya minyak yang sangat besar, tetapi juga karena posisi geografisnya yang dekat dengan Iran dan Irak, dua negara yang sering dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan. Dalam konteks ini, AS mengupayakan kerjasama militer dan keamanan dengan negara-negara Teluk untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut, serta melindungi kepentingan ekonomi dan keamanan nasionalnya (Alkalah, 2016). Ancaman terorisme juga mulai menjadi perhatian utama kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selama dekade ini. Meskipun ancaman terorisme internasional sudah ada sebelum periode ini, namun serangan-serangan terhadap kepentingan AS di luar negeri, seperti pemboman Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania pada tahun 1998, semakin menyoroti ancaman tersebut. Jaringan teroris internasional, seperti Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden, mulai menyusun strategi untuk menyerang kepentingan AS di Timur Tengah dan di luar Kawasan (Serikat & Carter, 2006). Serangan 11 September 2001 menjadi puncak dari ancaman terorisme yang dihadapi AS, yang kemudian mengubah secara drastis pendekatan kebijakan luar negeri AS terhadap kawasan Timur Tengah di tahun-tahun berikutnya. Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah pada periode 1991 hingga 2001 mencerminkan kepentingan AS dalam menjaga stabilitas kawasan, memastikan akses terhadap sumber daya energi, serta melawan ancaman-ancaman yang muncul, baik dari negara-negara kawasan maupun dari aktor non-negara seperti kelompok teroris (Budiarto, 2022). Meskipun ada upaya diplomasi dan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, hasilnya tidak selalu stabil atau bertahan lama. Sentimen anti-Amerika dan radikalisme terus tumbuh, yang pada akhirnya memicu

serangkaian peristiwa dramatis yang memengaruhi kebijakan AS di Timur Tengah di tahun-tahun setelah 2001 (Jamil, 2017).

Situasi negara-negara di Timur Tengah sangat berbeda dengan situasi negara-negara di wilayah lain. Mereka bergantung pada pendapatan dari minyak untuk memperkuat perlengkapan militer mereka, sehingga Timur Tengah memiliki kekuatan untuk mengancam harga minyak. Namun, ekonomi kawasan ini lemah dan bergantung pada perdagangan dengan negara-negara industri maju, sehingga AS tidak dapat mengancam harga minyak (Iv et al., 2005). Amerika Serikat sangat berkomitmen untuk mempertahankan eksistensi Israel karena alasan moral, emosional, dan politik. Ketika Perang Teluk berakhir pada Maret 1991, Presiden Bush kembali menegaskan bahwa dia ingin menjaga keamanan Israel dan bahwa perdamaian adalah tujuan utama AS (Soedradjat, 2022). Bush juga pernah mengatakan selama perang teluk bahwa AS terlibat dalam perang karena tiga alasan. Yang pertama adalah hukum internasional dan standar perilaku antar negara; yang kedua adalah hak asasi manusia (HAM) dan kewajiban negara terhadap warga negaranya. Yang ketiga, di sisi lain, adalah komitmen penuh untuk mempertahankan prinsip tersebut. Meskipun prinsip-prinsip ini memengaruhi kebijakan AS, mereka tidak mampu membuat pengambilan keputusan konsisten. Misalnya, selama perang teluk, Iraq berusaha menunjukkan bahwa AS tidak konsisten dalam menjalankan resolusi PBB, yang dianggap sebagai "double standard" oleh beberapa negara Arab (Serikat & Carter, 2006).

B. Perubahan Prioritas Amerika Pasca Perang Dingin

Pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat muncul sebagai satu-satunya negara adidaya. Dengan tidak adanya rival yang sebanding, kebijakan luar negeri AS beralih dari fokus pada pencegahan ekspansi komunis ke penegakan tata dunia yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi liberal dan pasar bebas. AS mulai mengintervensi di banyak negara untuk menjaga stabilitas global, baik secara ekonomi maupun politik (Pradana, 2023).

Amerika Serikat memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan arah politik global. Sebagai negara adidaya, pengaruhnya terhadap kebijakan internasional sangat besar. Negara ini memperkuat aliansi strategis dengan sekutunya, terutama melalui organisasi seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization). Selain itu, AS berusaha memperluas pengaruhnya melalui diplomasi dan bantuan luar negeri, sering kali bertindak sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional, termasuk di Timur Tengah dan Semenanjung Korea. Amerika Serikat juga memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara yang membutuhkan, menunjukkan komitmennya terhadap stabilitas global (Pradana, 2023).

Sebagai kekuatan ekonomi terkemuka di dunia, Amerika Serikat memainkan peran sentral dalam perdagangan internasional dan pasar keuangan global. Negara ini adalah pusat inovasi dan teknologi, menjadi rumah bagi perusahaan-perusahaan besar seperti Apple, Google, dan Facebook yang mendominasi sektor teknologi. Sebagai anggota G7 (Group of Seven), AS berpartisipasi aktif dalam mengatur perekonomian global dan menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dunia, menggunakan kekuatannya untuk membentuk kebijakan perdagangan internasional (Assyakurrohim et al., 2022). Amerika Serikat memiliki kekuatan militer terbesar di dunia, didukung oleh angkatan bersenjata yang modern dan

canggih, serta pangkalan militer yang tersebar di berbagai wilayah strategis. AS terlibat dalam berbagai konflik militer pasca Perang Dingin, seperti Perang Teluk pada 1991 dan Perang Afghanistan pada 2001. Selain itu, negara ini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas global dan melindungi kepentingan nasionalnya di berbagai kawasan dunia (Serikat & Carter, 2006).

Intervensi Militer dan Kemanusiaan Pasca Perang Dingin, AS terlibat dalam beberapa intervensi militer yang lebih bersifat kemanusiaan. Contohnya, keterlibatan di Balkan selama konflik Yugoslavia dan misi kemanusiaan di Somalia. Pendekatan ini mencerminkan perubahan dalam cara AS melihat perannya di dunia, di mana mereka tidak hanya berfokus pada kepentingan nasional tetapi juga pada tanggung jawab moral untuk membantu negara-negara yang mengalami krisis kemanusiaan (Studies, 2021). Transformasi Strategi Pertahanan Strategi pertahanan AS juga mengalami perubahan besar. Dari fokus pada pencegahan serangan dari kekuatan besar, kini lebih kepada menghadapi ancaman dari negara-negara kecil dan kelompok teroris. Ini terlihat dalam kebijakan yang lebih adaptif terhadap ancaman non-tradisional, seperti terorisme internasional yang muncul setelah serangan 11 September 2001. AS mulai mengembangkan strategi yang lebih komprehensif, termasuk penggunaan intelijen dan operasi khusus (Yuanita et al., 2024).

Setelah berakhirnya Perang Dingin, pengaruh budaya Amerika Serikat semakin meluas. Film, musik, dan gaya hidup Amerika telah menyebar ke berbagai negara, menjadi fenomena budaya yang populer, terutama di kalangan generasi muda. Bahasa Inggris juga telah menjadi bahasa internasional yang dominan, dengan banyak orang di seluruh dunia mempelajarinya, yang semakin memperkuat penyebaran budaya Amerika Secara keseluruhan, Amerika Serikat tidak hanya berperan sebagai kekuatan politik dan militer, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi dan budaya di panggung global. Dengan pendekatan yang beragam dalam diplomasi, ekonomi, dan budaya, AS terus membentuk dinamika internasional dan berkontribusi pada stabilitas serta perkembangan (Yuanita et al., 2024).

C. Penekanan pada Proses Perdamaian Arab-Israel

Antara tahun 1991 hingga 2001, Amerika Serikat memainkan peran krusial dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara Israel dan Palestina. Selama periode ini, AS berfungsi sebagai mediator utama dalam berbagai inisiatif perdamaian yang bertujuan untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama di Timur Tengah. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah Konferensi Perdamaian Madrid yang diadakan pada tahun 1991. Konferensi ini, yang disponsori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, merupakan upaya pertama untuk mempertemukan Israel dengan perwakilan Palestina serta negara-negara Arab lainnya dalam rangka merundingkan perdamaian yang komprehensif. Meskipun tidak menghasilkan kesepakatan langsung, konferensi ini membuka jalan bagi negosiasi yang lebih mendalam. Upaya perdamaian berlanjut dengan Perjanjian Oslo, yang ditandatangani pada tahun 1993 dengan dukungan AS. Perjanjian ini menandai terobosan besar, karena untuk pertama kalinya Israel dan Palestina sepakat untuk saling mengakui hak keberadaan masing-masing (Serikat & Carter, 2006).

Presiden Bill Clinton memainkan peran penting dalam mediasi proses Oslo, bahkan menjadi tuan rumah bagi penandatanganan perjanjian di Gedung Putih. Hasil dari perjanjian ini adalah pembentukan Otoritas Palestina sebagai entitas yang mengelola wilayah Palestina di Tepi Barat dan Gaza. Kemudian, pada tahun 2000, AS kembali berperan kunci dalam Pembicaraan Camp David II, yang diadakan di bawah pemerintahan Clinton. Meskipun pembicaraan ini tidak berhasil mencapai kesepakatan akhir antara Yasser Arafat (pemimpin Otoritas Palestina) dan Ehud Barak (Perdana Menteri Israel) mengenai isu-isu krusial seperti status Yerusalem, pengungsi Palestina, dan batas wilayah, upaya AS dalam memediasi negosiasi ini menegaskan peran Amerika sebagai mediator sentral dalam konflik Israel-Palestina pada periode tersebut. Selama dekade ini, AS berusaha keras untuk mendorong kedua pihak menuju perdamaian melalui diplomasi dan negosiasi, meskipun tantangan politik dan keamanan yang dihadapi di lapangan membuat pencapaian perdamaian yang berkelanjutan menjadi sulit (Satrio, 2019).

D. Pengaruh Perang Teluk

Perang Teluk II, yang berlangsung dari 1990 hingga 1991, memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan keamanan di Timur Tengah, serta terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Setelah kemenangan koalisi internasional dalam Perang Teluk II, pengaruh Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia semakin kuat. AS tidak hanya berhasil mengusir pasukan Irak dari Kuwait, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan dominan di Timur Tengah. Hal ini terlihat dari peningkatan kehadiran militer AS di wilayah tersebut, termasuk pembentukan pangkalan-pangkalan militer yang strategis (Soedradjat, 2022).

Perang Teluk II berhasil mengembalikan Kuwait ke tangan pemerintahannya, namun kondisi politik di Irak justru menjadi semakin tidak stabil. Sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh PBB terhadap Irak setelah perang menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, yang pada gilirannya memicu ketidakpuasan di dalam negeri dan meningkatkan ketegangan di kawasan. Ketidakstabilan ini menciptakan tantangan baru bagi kebijakan luar negeri AS, yang harus menanggapi potensi ancaman dari rezim Saddam Hussein. Perang Teluk II memaksa AS untuk menyesuaikan strategi keamanannya di Timur Tengah. Dengan meningkatnya ancaman dari Irak, AS mulai mengembangkan kebijakan yang lebih agresif terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ancaman, termasuk penegakan zona larangan terbang di utara dan selatan Irak. Ini juga menciptakan dasar bagi intervensi militer yang lebih besar di masa depan, termasuk Perang Teluk III pada tahun 2003 (Printina, 2018).

Di samping itu, Perang Teluk II turut berdampak pada proses perdamaian Arab-Israel. AS menggunakan pengaruhnya untuk mendorong negara-negara Arab untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian, dengan harapan bahwa stabilitas di kawasan dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi. Konferensi Perdamaian Madrid pada tahun 1991, yang diadakan setelah perang, merupakan salah satu upaya untuk memfasilitasi pembicaraan antara Israel dan negara-negara Arab. Akibat dari sanksi dan intervensi militer, munculnya kelompok-kelompok ekstremis di kawasan menjadi lebih nyata. Ketidakpuasan terhadap kebijakan luar negeri AS dan dampak dari perang menyebabkan radikalisme di kalangan beberapa kelompok, yang

melihat AS sebagai musuh. Ini berkontribusi pada meningkatnya ketegangan dan konflik di berbagai belahan Timur Tengah (Imannurdin et al., 2023).

Perang Teluk II memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap politik dan keamanan di Timur Tengah. Pengaruh Amerika Serikat yang semakin kuat, ketidakstabilan di Irak, dan perubahan dalam strategi keamanan menjadi beberapa aspek penting yang membentuk dinamika kawasan selama dekade berikutnya. Perang ini tidak hanya mengubah lanskap politik di Timur Tengah, tetapi juga mempengaruhi kebijakan luar negeri AS dalam menghadapi tantangan baru di kawasan tersebut (Printina, 2018).

E. Perjanjian Perdamaian Israel-Palestina

Perjanjian Damai Israel-Palestina pada periode 1991 hingga 2001 mencakup berbagai inisiatif dan upaya untuk mengatasi konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Proses ini dimulai dengan Konferensi Madrid pada 1991, yang mempertemukan berbagai pihak untuk negosiasi damai. Kemudian, muncul Kesepakatan Oslo pada 1993 dan 1995 yang memperkenalkan pengakuan timbal balik antara PLO dan Israel serta pembentukan Otoritas Nasional Palestina. Meskipun ada langkah maju, pertemuan di Camp David pada 2000 dan pembicaraan di Taba pada 2001 menunjukkan bahwa perbedaan mendasar mengenai isu-isu penting seperti status Yerusalem dan hak kembali pengungsi Palestina tetap menjadi hambatan utama. Keseluruhan periode ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang terus berlanjut dalam upaya mencapai perdamaian yang langgeng (Iii et al., 1948).

Selama periode 1991-2001, terdapat beberapa perjanjian perdamaian yang signifikan antara Israel dan Palestina yang berusaha untuk mengatasi konflik yang telah berlangsung lama Konferensi Perdamaian Madrid (1991) Konferensi ini disponsori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan tujuan mempertemukan negara-negara Arab seperti Jordania, Lebanon, Suriah, serta Palestina (yang bergabung dalam delegasi Jordania) dengan Israel. Meskipun konferensi ini tidak menghasilkan perjanjian langsung, namun berhasil membuka dialog antara Israel dan Palestina, menciptakan kerangka untuk negosiasi selanjutnya, dan menjadi langkah awal yang penting dalam proses perdamaian (Soedradjat, 2022).

Perjanjian Oslo I (1993) Perjanjian ini ditandatangani di Washington dan menghasilkan beberapa poin penting, termasuk pengakuan mutual antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Selain itu, perjanjian ini juga mencakup penarikan sebagian pasukan Israel dari Tepi Barat dan Jalur Gaza serta pembentukan Pemerintahan Otonomi Palestina yang bertugas mengelola wilayah tertentu (Alkalah, 2016).

Perjanjian Oslo II (1995) Melanjutkan kesepakatan dari Oslo I, perjanjian ini mencakup pembagian Tepi Barat menjadi tiga zona (A, B, dan C) dengan kontrol yang berbeda antara Israel dan Otoritas Palestina. Oslo II juga mengatur pemilihan umum pertama di Palestina untuk membentuk otoritas pemerintahan lokal, yang merupakan langkah penting dalam proses demokratisasi di wilayah tersebut (Soedradjat, 2022). Memorandum Wye River (1998) Ditandatangani di Wye Plantation, Maryland, perjanjian ini menegaskan kembali komitmen

terhadap perjanjian Oslo dan mengatur langkah-langkah tambahan seperti penarikan pasukan Israel dari wilayah tertentu di Tepi Barat. Selain itu, perjanjian ini memberikan izin bagi Palestina untuk menjalankan fungsi keamanan dan menekankan penghentian aktivitas terorisme (Printina, 2018).

Konferensi Camp David 2000, Konferensi ini bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu utama yang belum terselesaikan, termasuk perbatasan final, status Jerusalem, hak pengungsi Palestina, dan pembagian tanah. Meskipun pertemuan ini tidak berhasil mencapai kesepakatan akhir, Camp David tetap menjadi fondasi penting bagi negosiasi di masa depan. Setiap perjanjian tersebut merupakan upaya diplomasi yang signifikan dalam rangka mencapai perdamaian. Namun, tantangan besar dalam implementasi dan ketidakstabilan politik regional terus menghambat pencapaian perdamaian yang berkelanjutan antara kedua pihak. Konflik yang berkepanjangan ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang dihadapi dan perlunya upaya berkelanjutan untuk mencapai solusi damai (Adolph, 2016).

PENUTUP

Dengan runtuhnya Uni Soviet, AS muncul sebagai kekuatan dominan global dalam dekade ini. Perubahan geopolitik ini memungkinkan AS untuk merumuskan kebijakan luar negeri yang lebih agresif, dengan tujuan mempertahankan stabilitas regional dan melindungi kepentingan ekonomi, khususnya keamanan energi di Timur Tengah. Dengan kawasan ini sebagai salah satu wilayah utama penghasil minyak dunia, AS memprioritaskan hubungan baik dengan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, untuk memastikan akses yang stabil terhadap sumber daya energi tersebut. Kerjasama ini menciptakan ketergantungan timbal balik, di mana AS memberikan dukungan ekonomi dan keamanan, sementara negara-negara Teluk membantu memenuhi kebutuhan energi AS.

Periode ini juga ditandai dengan keterlibatan aktif AS dalam konflik-konflik di Timur Tengah, terutama melalui intervensi militer. Salah satu peristiwa penting adalah Perang Teluk 1991, ketika AS memimpin koalisi internasional untuk mengusir pasukan Irak dari Kuwait setelah invasi Irak. Keterlibatan AS dalam Perang Teluk memperkuat kehadiran militer dan politiknya di Timur Tengah, tetapi juga menciptakan ketidakstabilan politik di Irak akibat sanksi ekonomi yang berat. Kebijakan ini membawa dampak jangka panjang, memperburuk kondisi sosial-ekonomi di Irak, memicu sentimen anti-Amerika, dan meningkatkan radikalisasi di kalangan kelompok-kelompok ekstremis. Ketegangan ini menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya ancaman terorisme, yang kelak akan berkembang menjadi isu keamanan utama AS di dekade-dekade berikutnya.

Di samping menjaga keamanan energi dan stabilitas politik di Timur Tengah, AS juga berperan sebagai mediator dalam konflik Israel-Palestina. AS memanfaatkan pengaruhnya untuk memfasilitasi pertemuan dan negosiasi damai antara kedua pihak, yang puncaknya terlihat dalam Konferensi Madrid pada 1991 dan Perjanjian Oslo pada 1993. Di bawah pemerintahan Presiden Bill Clinton, AS berupaya keras mencapai kesepakatan damai yang komprehensif untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini. Meskipun upaya perdamaian tersebut mencatat kemajuan diplomatik penting, tantangan besar tetap ada,

termasuk ketidakpercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat dan seringnya kekerasan sporadis di lapangan. Kegagalan dalam mencapai perdamaian yang berkelanjutan menggambarkan kompleksitas konflik Timur Tengah yang tidak hanya melibatkan isu-isu politik, tetapi juga agama dan identitas nasional yang dalam.

Hubungan strategis AS dengan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, di periode ini mengalami perubahan signifikan. Sebelum tragedi 11 September 2001, AS dan Arab Saudi memiliki hubungan yang erat di bidang ekonomi dan keamanan, dengan fokus utama pada stabilitas dan suplai energi. Namun, setelah serangan 11 September, yang sebagian besar pelakunya berasal dari Arab Saudi, hubungan AS dengan negara-negara Teluk mengalami ketegangan. AS mulai memandang Timur Tengah sebagai sumber potensial radikalisme dan terorisme, sehingga kebijakan luar negeri AS mengalami pergeseran. Selain melanjutkan kerjasama keamanan, AS juga menekankan pentingnya reformasi politik di negara-negara Arab untuk mengurangi radikalisme. Ini menandai pergeseran besar dalam pendekatan AS terhadap kawasan, dari sekadar menjaga stabilitas menuju promosi demokrasi dan hak asasi manusia.

Kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah selama 1991-2001 menunjukkan bagaimana AS berupaya mempertahankan dominasinya dalam dunia pasca-Perang Dingin. Meskipun AS berhasil memperluas pengaruh militernya dan mengamankan akses energi, kebijakan tersebut juga menciptakan ketegangan baru dan memicu konflik yang berkepanjangan di kawasan ini. Kompleksitas hubungan internasional, terutama di kawasan yang sensitif secara politik dan ideologis seperti Timur Tengah, menunjukkan bahwa kebijakan hegemonik sering kali berisiko menciptakan dampak yang tidak diinginkan, termasuk radikalisasi, sentimen anti-Amerika, dan ketidakstabilan jangka panjang yang terus berlanjut hingga hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). DINAMIKA KONFLIK DAN UPAYA PROSES PERDAMAIAN YANG TERJADI ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA *Konflik*. 1–23.
- Alkalah, C. (2016). POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DI TIMUR TENGAH *Konflik*. 19(5), 1–23.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2022). Case Study Method in Qualitative Research. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 1–9.
- Budiarto, M. A. F. (2022). Pengaruh Kemunculan Isis Terhadap Regional Security Complex Timur Tengah (2012 – 2019). (MJIR) *Moestopo Journal International Relations*, 2(1), 17–29. <https://www.journal.moestopo.ac.id/index.php/mjir/article/view/2027/923>
- Iii, B. A. B., Penyelesaian, A. D., & Palestina, K. (1948). *Dinamika Penyelesaian Konflik Palestina dan Israel di PBB*.
- Imannurdin, Y., Sudiarso, A., & Sianturi, D. (2023). Strategi Pertahanan Indonesia: Pelajaran Dari Kekalahan Iraq Dalam Perang Teluk II 1990-1991. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 1123–1133. <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5207>
- P., & Putra, A. J. Iv, B. A. B., KBRI, D. P., Teori, L., Pendapatan, A., Pendapatan, (2005).

- BAB I.pdf. In *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (pp. 15–19).
- Jamil, A. H. (2017). Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Counter Terrorism Pada Masa Kepemimpinan Obama. *Ilmu Hubungan Internasional*, 1–17.
- Mustofa, A. Z. (2022). Analisis Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Iran Pasca Arab Spring (2017-2021). *TAZKIR: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keislaman*, 8(2), 211–227. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/us-iran-relations-a-cloudy-2020-forecast/>.
- Nasir, M. N., Ramli, Z., Alatas, S. M., Abdul Rahman, A. A., & Zulkifli, M. F. (2017). Undang-Undang kemanusiaan antarabangsa dan perang terhadap keganasan: Suatu tinjauan kritikal. *Malaysian Journal of Society and Space*, 13(4), 106–116. <https://doi.org/10.17576/geo-2017-1304-10>
- Pradana, M. E. (2023). From Engagement to Containment? Perubahan Politik Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Tiongkok. *Ilmu Hubungan Internasional*, 03(01).
- Printina, B. I. (2018). Sejarah Asia Barat Modern (Dari Nasionalisme Sampai Perang Teluk ke-III). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). https://repository.usd.ac.id/36970/1/5282_Sejarah%2BAsia%2BBarat%2BModern%281%29.pdf
- Satris, R. (2019). Peranan Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Palestina Pasca Pengakuan Jerusalem Sebagai Ibu Kota Israel. *Politea*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.21043/politea.v2i2.5884>
- Serikat, P. A., & Carter, J. (2006). Bab V Amerika Serikat Dan Timur Tengah.
- SHELEMO, A. A. (2023). No Title. *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Skripsi kebijakan luar negari amerika serikat di timur tengah dalam studi kasus isis. (2017).
- Soedradjat, S. (2022). Perang Teluk III : Dimensi Politik dan Bisnis. In *Lembaran publikasi minyak dan gas bumi* (Vol. 38, Issue 1, pp. 26–32). <https://doi.org/10.29017/lpmgb.38.1.747>
- Studies, S. (2021). Perilaku Destruktif Dalam Politik Standar Ganda Amerika Serikat Terhadap Demokratisasi Mesir dan Suriah (Destructive Behavior in US Double Standard Politics Against the Democratization of Egypt and Syria) Yogi Fery Hidayat Universitas Gadjah Mada Email. *Ascarya*, 2(1).
- Yuanita, A. Z., Ribawati, E., Noeriman, T., & Sumantri, A. (2024). Kondisi Amerika Setelah Perang Dingin Berakhir. *Serang Banten*, 2(1).